

**EVALUASI PROGRAM PEMBINAAN KEPERIBADIAN DENGAN DISCREPANCY
MODEL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TANJUNG PATI**

Muhammad Raihan¹, Wido Cepaka Warih²

¹Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

²Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Pengayoman Indonesia

¹Mraihan241202@gmail.com

²Wido.cepaka@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the personality development program at the Tanjung Pati Class IIB Correctional Institution using Malcolm M. Provus' Discrepancy evaluation model. The background of this study is based on the importance of personality development for prisoners in supporting the rehabilitation and social reintegration process after sentencing, as well as the suboptimal implementation of existing programs due to various constraints such as limited human resources, facilities and infrastructure, and the absence of a systematic evaluation mechanism. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and document studies. Informants in this study consisted of guidance officers and inmates who participated in the personality program. Data analysis was carried out in stages of data reduction, data presentation, and verification. The results of the study show a gap between the established standards and the implementation of the program, particularly in terms of program design, operationalization, implementation process, and final results. Some of the main obstacles found include the absence of written SOPs, irregular activity schedules with visiting times, the use of unrepresentative facilities, and a limited number of professional teaching staff. These findings indicate that the implementation of personality development has not fully met expectations. Therefore, improvements are needed in planning, strengthening regulations, and allocating resources more appropriately so that the objectives of personality development as part of the correctional system can be optimally achieved.

Keywords: Program evaluation, Personality development, Prisoners, Discrepancy Model, Tanjung Pati Prison

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati dengan menggunakan model evaluasi Discrepancy oleh Malcolm M. Provus. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pembinaan kepribadian narapidana dalam mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial pasca-pemidanaan, serta belum optimalnya pelaksanaan program yang ada akibat berbagai kendala seperti

keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta tidak adanya mekanisme evaluasi yang sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petugas pembinaan, dan narapidana yang mengikuti program kepribadian. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan pelaksanaan program, khususnya pada aspek desain program, operasionalisasi, proses pelaksanaan, dan hasil akhir. Beberapa hambatan utama yang ditemukan antara lain adalah tidak adanya SOP tertulis, ketidakberaturan jadwal kegiatan dengan waktu kunjungan, penggunaan fasilitas yang tidak representatif, serta keterbatasan tenaga pengajar yang profesional. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan kepribadian belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan, penguatan regulasi, serta pengalokasian sumber daya yang lebih tepat agar tujuan pembinaan kepribadian sebagai bagian dari sistem pemasyarakatan dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Evaluasi program, Pembinaan kepribadian, Narapidana, Discrepancy Model, Lapas Tanjung Pati

A. Pendahuluan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran utama dalam menjamin hak-hak narapidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Menurut Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana”. Pelaksanaan program pembinaan bagi Narapidana di dalam Lapas merupakan bagian dari suatu dinamika yang bertujuan

untuk membekali mereka dengan keterampilan dan kesiapan dalam menghadapi kehidupan setelah menjalani masa hukuman (Suhariyanto & Karyoto, 2024). Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan, “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Selanjutnya pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan". Terdapat 2 jenis pembinaan untuk narapidana di Lapas, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kepribadian.

Pembinaan kemandirian di Lapas bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan dan kemampuan kerja agar mandiri secara ekonomi setelah bebas (Brahmatya & Subroto, 2023). Sementara itu, pembinaan kepribadian berfokus pada mental, moral, dan spiritual melalui pendidikan agama, konseling psikologis, bimbingan sosial, program pendidikan dan literasi, serta reintegrasi sosial. Kedua jenis pembinaan ini diharapkan membentuk warga binaan yang siap kembali ke masyarakat dengan sikap, perilaku, dan nilai-nilai positif demi kehidupan yang lebih baik. Dalam pelaksanaannya, pembinaan kepribadian sering kali ditemukan berbagai tantangan dan hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Beberapa masalah yang sering muncul adalah adanya perbedaan antara apa yang direncanakan dalam program dan

kenyataan yang terjadi di lapangan serta permasalahan lain seperti SDM yang kurang berkualitas, kelengkapan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas hingga alokasi anggaran yang tidak sepadan dengan kegiatan yang dilakukan mengakibatkan proses pembinaan ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan (Hikmahanzvazio & Wibowo, 2022).

Evaluasi program pembinaan kepribadian penting untuk menilai keberhasilan tujuan pemsarakatan. Pembinaan yang tepat membentuk narapidana dengan nilai spiritual baik dan siap kembali ke masyarakat, sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemasarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga membina dan mereintegrasikan narapidana (Soge & Sitorus, 2022). Proses ini memastikan hak-hak mereka terlindungi sesuai prinsip Hak Asasi Manusia, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat secara positif. Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Tanjung Pati, program pembinaan kepribadian sudah diterapkan, namun belum ada mekanisme evaluasi yang sistematis dan menyeluruh untuk menilai sejauh mana keberhasilan program tersebut.

Dengan dilakukannya evaluasi yang mendalam, kita dapat menilai berbagai aspek program ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Evaluasi ini juga dapat mengidentifikasi perbedaan yang ada, antara ekspektasi yang ditetapkan dalam perencanaan dan hasil nyata yang diperoleh di lapangan.

Program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati mencakup Pesantren, PAUD, PKBM Paket A, B, C, dan Randai. Pesantren menggunakan sarana masjid, Al-Qur'an, iqra, dan sajadah untuk meningkatkan nilai keagamaan narapidana. PAUD memanfaatkan buku tulis dan alat tulis guna membekali kemampuan dasar membaca, menulis, dan menghitung. PKBM menyediakan buku pelajaran dan alat tulis untuk memberikan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA. Seluruh kegiatan ini ditujukan untuk membentuk sikap, perilaku, dan pola pikir yang positif, serta mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

Salah satu program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati yang mempunyai

kendala dalam kegiatannya adalah Program PKBM Paket A, B, dan C yang bertujuan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menyelesaikan pendidikan formalnya. Kegiatan pembelajaran dilakukan di lapangan apel yang juga digunakan sebagai area kunjungan. Saat jam kunjungan berlangsung, program ini dibatasi dengan tirai sebagai sekat antara ruang belajar dan area kunjungan. Kendala ini tentu berdampak pada efektivitas proses belajar mengajar, karena suasana yang bising dan terbuka dapat mengurangi konsentrasi narapidana yang sedang belajar. Dalam sebuah proses pembelajaran, sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas khusus yang tidak terhubung langsung dengan kegiatan lain, menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan Pendidikan

Meskipun berbagai program ini telah dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, namun tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan program sering kali tidak teridentifikasi dengan jelas. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan potensi perbaikan dalam pelaksanaan

program pembinaan kepribadian tersebut. Tanpa adanya evaluasi yang sistematis, sulit 4. Randai Alat Musik Randai, Pakaian Adat, Narapidana memahami seni budaya Minangkabau dan memiliki keterampilan seni pertunjukan Politeknik Pengayoman Indonesia 5 untuk mengetahui sejauh mana program-program ini efektif dalam menciptakan perubahan positif pada narapidana. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan kontribusi penting dengan mengkaji bagaimana program-program pembinaan kepribadian yang ada dapat lebih baik diimplementasikan, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang perlu diatasi

Penelitian Priskila Issak Benyamin dkk. (2021) di Kabupaten Barito Timur mengevaluasi pembelajaran daring Pendidikan Agama Kristen selama pandemi dengan pendekatan Discrepancy Model. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan pada aspek desain program, operasional, dan produk sementara, yang dipengaruhi keterbatasan persiapan materi, metode pembelajaran, literasi digital guru, serta infrastruktur jaringan. Dominasi penggunaan aplikasi WhatsApp berdampak pada

rendahnya interaksi dan pemahaman siswa. Peneliti merekomendasikan pelatihan pengelolaan pembelajaran daring menggunakan Google Classroom, Zoom, dan LMS lainnya, serta peningkatan infrastruktur dan penyediaan perangkat untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara optimal.

Evaluasi program pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tanjung Pati penting dilakukan karena program ini berperan besar dalam membekali narapidana sebelum kembali ke masyarakat. Tanpa evaluasi yang menyeluruh, narapidana berisiko tidak siap menghadapi kehidupan setelah bebas, yang dapat memicu pengulangan tindak pidana atau kesulitan beradaptasi. Melalui evaluasi, dapat diketahui sejauh mana program berjalan efektif, kendala yang dihadapi, dan upaya perbaikan yang diperlukan agar tujuan pemasyarakatan, yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dapat tercapai secara optimal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain

deskriptif untuk memahami dan mengevaluasi program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati secara mendalam. Data dikumpulkan dari sumber primer, yaitu pejabat, petugas masyarakatan, dan narapidana peserta program, serta sumber sekunder berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, absensi, jadwal program, dan panduan pelaksanaan pembinaan. Teknik pengumpulan data mencakup observasi untuk melihat pelaksanaan kegiatan, wawancara untuk memperoleh informasi mendalam, dan studi dokumen untuk melengkapi dan memverifikasi temuan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi untuk memastikan validitas serta memberikan gambaran yang holistik tentang proses, pengalaman, dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas program. Penelitian dilakukan di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati dengan jadwal yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari pengambilan data hingga penyusunan laporan penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Model Evaluasi *Discrepancy* Pada Program Pembinaan

Kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati

Evaluasi program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati dilakukan menggunakan *Discrepancy Model* yang dikembangkan oleh Malcolm M. Provus. Model ini menekankan proses perbandingan antara kondisi ideal yang telah ditetapkan sebagai standar dengan pelaksanaan aktual di lapangan. Evaluasi dilakukan secara sistematis pada setiap tahap program untuk mengidentifikasi kesenjangan (*discrepancy*) yang terjadi. Standar yang digunakan dalam evaluasi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakatan serta peraturan pelaksanaan terkait pembinaan narapidana.

Discrepancy Model terdiri atas lima dimensi evaluasi, yaitu Program Design, Program Operation, Program Interim Products, Program Terminal Products, dan Program Cost Analysis. Berikut uraian hasil evaluasi untuk masing-masing dimensi sesuai temuan penelitian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati.

a. Program Design

Tahap program design merupakan tahap perencanaan

yang menetapkan tujuan, standar, dan komponen program sebelum dilaksanakan. Berdasarkan dokumen perencanaan, kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati mencakup Pesantren, PKBM Paket A/B/C, Randai, dan PAUD. Setiap kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pemasyarakatan, yakni meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian narapidana (Pasal 1 ayat 10 UU No. 22 Tahun 2022).

Program pesantren bertujuan menanamkan nilai keagamaan dan meningkatkan pemahaman spiritual narapidana. PKBM Paket A/B/C memberikan kesempatan bagi narapidana menyelesaikan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA. Randai sebagai seni pertunjukan Minangkabau menjadi sarana pengembangan bakat dan pelestarian budaya, sedangkan PAUD dikhususkan bagi narapidana perempuan yang memiliki anak di dalam lapas.

Meskipun cakupan kegiatan telah relevan dengan standar pembinaan kepribadian, hasil evaluasi menunjukkan belum

adanya SOP tertulis yang menjadi acuan baku pelaksanaan tiap kegiatan. Ketiadaan SOP ini mengakibatkan variasi metode dan pelaksanaan di lapangan, sehingga tidak ada patokan yang seragam untuk mengukur keberhasilan. Menurut Provus (1969), ketepatan evaluasi sangat bergantung pada adanya standar yang jelas dan terdokumentasi, karena tanpa standar, sulit membandingkan kinerja aktual dengan target yang diharapkan.

b. Program Operation

Tahap program operation menilai proses pelaksanaan program dan kesesuaian penggunaan sumber daya dengan standar yang direncanakan. Di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, pelaksanaan program melibatkan petugas pembinaan internal, mitra eksternal seperti lembaga pendidikan, dan relawan. Setiap pihak memiliki peran sesuai kompetensi masing-masing, misalnya petugas lapas mengelola administrasi dan pengawasan, sedangkan tenaga pengajar dari luar memberikan materi pembelajaran atau pelatihan.

Namun, evaluasi menemukan beberapa kendala signifikan pada tahap ini, terutama terkait keterbatasan sarana dan prasarana. Contohnya, kegiatan PKBM dilaksanakan di lapangan apel yang juga difungsikan sebagai area kunjungan keluarga. Selama jam kunjungan, area ini hanya dipisahkan tirai dari ruang belajar, sehingga suara dan aktivitas dari area kunjungan kerap mengganggu konsentrasi peserta didik. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan standar fasilitas pembelajaran yang ideal, di mana seharusnya ruang belajar terpisah dari gangguan eksternal agar proses belajar mengajar berjalan optimal.

Selain itu, beberapa kegiatan kesenian seperti Randai juga terkendala peralatan yang terbatas. Pakaian adat dan alat musik tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup bagi seluruh peserta. Fasilitas PAUD juga belum dilengkapi media belajar yang memadai untuk anak-anak. Menurut Discrepancy Model, ketidaksesuaian antara sarana aktual dan standar yang diharapkan pada tahap

operasional perlu ditindaklanjuti melalui penyesuaian fasilitas atau revisi standar jika pelaksanaan aktual dinilai lebih tepat dalam konteks tertentu. Namun, dalam kasus Lapas Kelas IIB Tanjung Pati, kondisi fasilitas yang ada justru membatasi mutu pembelajaran dan pembinaan.

c. Program Interim Products

Tahap program interim products mengevaluasi capaian sementara atau hasil antara yang diperoleh selama program berjalan. Data dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar narapidana peserta program mengalami peningkatan motivasi belajar dan lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan. Peserta PKBM menunjukkan kemajuan dalam keterampilan membaca, menulis, dan berhitung, sedangkan peserta pesantren mulai menerapkan nilai-nilai keagamaan dalam interaksi sehari-hari di dalam lapas.

Namun, temuan penting pada tahap ini adalah ketidakkonsistenan kehadiran peserta. Jadwal kegiatan kerap berbenturan dengan jam

kunjungan keluarga atau agenda lapas lainnya, seperti apel keamanan atau kegiatan pembinaan kemandirian. Akibatnya, proses pembelajaran terputus dan pencapaian kompetensi menjadi tidak merata di antara peserta.

Kondisi ini sesuai dengan yang diungkapkan Benyamin dkk. (2021) dalam evaluasi pembelajaran daring, bahwa faktor teknis seperti penjadwalan dan ketersediaan fasilitas dapat berpengaruh langsung terhadap pencapaian target pembelajaran. Dalam kerangka Discrepancy Model, hambatan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara target jangka pendek yang diharapkan (misalnya peningkatan kompetensi dasar) dengan capaian aktual yang terhambat oleh faktor non-akademis.

d. Program Terminal Products

Tahap program terminal products berfokus pada capaian akhir atau hasil utama program. Berdasarkan data penelitian, sebagian peserta PKBM berhasil menyelesaikan pendidikan setara SD, SMP, atau SMA dan

memperoleh ijazah resmi. Peserta pesantren menunjukkan peningkatan dalam pemahaman dan praktik keagamaan, termasuk kemampuan membaca Al-Qur'an dan mengikuti kegiatan ibadah secara konsisten. Peserta Randai mampu menampilkan pertunjukan seni dengan keterampilan yang lebih baik, sementara program PAUD memberikan manfaat dalam perkembangan kognitif dan sosial anak-anak yang ikut serta.

Walaupun demikian, perubahan perilaku positif dan keterampilan sosial belum merata di seluruh peserta program. Beberapa narapidana masih menunjukkan kesulitan dalam mengendalikan emosi, mematuhi aturan, dan berinteraksi secara konstruktif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan akademik atau keterampilan teknis belum sepenuhnya diikuti oleh keberhasilan dalam aspek psikososial, padahal kedua aspek ini sama-sama menjadi tujuan pembinaan kepribadian.

e. Program Cost Analysis

Tahap program cost analysis mengevaluasi efisiensi penggunaan anggaran terhadap

hasil yang dicapai. Sumber pendanaan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati berasal dari DIPA Lapas, dukungan mitra, dan donasi. Namun, jumlah anggaran yang tersedia relatif kecil dibandingkan kebutuhan riil, terutama untuk pengadaan fasilitas belajar, media pembelajaran, dan honorarium tenaga pengajar profesional. Kondisi ini membatasi intensitas pelaksanaan kegiatan dan keberagaman materi yang dapat diberikan kepada narapidana.

Provus (1969) menekankan bahwa analisis biaya perlu mempertimbangkan rasio antara input yang digunakan dan output yang dihasilkan. Dalam konteks ini, meskipun dana yang terbatas telah dimanfaatkan secara optimal, keterbatasan sumber daya tetap menjadi faktor pembatas utama dalam pencapaian tujuan pembinaan kepribadian.

Hasil evaluasi dengan Discrepancy Model menunjukkan bahwa kesenjangan terjadi pada seluruh dimensi evaluasi. Faktor

utama penyebab kesenjangan adalah sebagai berikut :

- 1) Ketiadaan SOP tertulis sebagai acuan baku pelaksanaan.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk ruang belajar yang tidak representatif.
- 3) Penjadwalan yang tumpang tindih dengan kegiatan lain di lapas.
- 4) Minimnya tenaga pengajar profesional.
- 5) Keterbatasan anggaran yang menghambat pengembangan fasilitas dan kegiatan.

2. Faktor-Faktor Kendala Dalam Program Pembinaan Kepribadian Dengan Discrepancy Model di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan. Evaluasi dengan menggunakan Discrepancy Model mengidentifikasi kesenjangan antara standar ideal yang telah dirumuskan

dengan pelaksanaan aktual di lapangan, di mana kesenjangan tersebut sebagian besar disebabkan oleh kendala struktural, teknis, dan sumber daya. Berikut uraian mendalam setiap faktor kendala tersebut sesuai data lapangan penelitian.

1) Ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tertulis

Kendala yang paling mendasar adalah belum adanya SOP tertulis yang mengatur pelaksanaan setiap kegiatan pembinaan kepribadian. Walaupun program seperti Pesantren, PKBM Paket A/B/C, Randai, dan PAUD telah dijalankan, tidak ada dokumen baku yang menjadi acuan bersama bagi seluruh pelaksana. Akibatnya, pelaksanaan program sangat bergantung pada kebiasaan atau kebijakan petugas yang sedang bertugas. Dalam perspektif Discrepancy Model, ketiadaan standar ini menimbulkan kesenjangan pada dimensi program design, karena standar merupakan tolok ukur awal yang digunakan untuk membandingkan kinerja aktual

Implikasinya, sulit dilakukan evaluasi yang obyektif terhadap pencapaian tujuan program, karena indikator keberhasilan tidak tertulis secara formal. Kondisi ini juga berpotensi menimbulkan perbedaan metode antar petugas, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi mutu pembinaan. Menurut Putra (2020), penetapan standar yang jelas pada tahap perencanaan adalah syarat mutlak untuk menjamin keberhasilan program pembinaan.

2) Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi hambatan signifikan. Sebagai contoh, kegiatan PKBM dilaksanakan di lapangan apel yang juga berfungsi sebagai area kunjungan. Selama jam kunjungan, area ini dipisahkan dengan tirai, namun suasana tetap bising dan mengganggu konsentrasi belajar. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara fasilitas ideal yang diharapkan dalam program operation dengan kondisi nyata di lapangan.

Selain ruang belajar, kelengkapan alat pembelajaran juga masih terbatas. Beberapa kegiatan, seperti Randai atau PAUD, belum didukung dengan media dan perlengkapan yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran interaktif. Fasilitas yang minim mengurangi efektivitas transfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta. Hal ini selaras dengan temuan Hikmahanzio & Wibowo (2022) yang menyatakan bahwa kualitas sarana prasarana memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan pembinaan di Lapas.

3) Penjadwalan yang Tidak Terintegrasi

Jadwal kegiatan pembinaan sering kali berbenturan dengan jam kunjungan maupun kegiatan internal Lapas lainnya. Kondisi ini berpengaruh langsung pada tingkat kehadiran peserta, khususnya untuk program PKBM dan kegiatan keagamaan. Pada dimensi program interim products, gangguan jadwal ini menghambat pencapaian target jangka pendek seperti penyelesaian materi pembelajaran sesuai rencana.

Kegiatan yang tumpang tindih menunjukkan lemahnya koordinasi internal dalam pengaturan jadwal pembinaan. Tanpa perencanaan jadwal yang terintegrasi, efektivitas program sulit tercapai karena peserta harus memilih antara mengikuti pembinaan atau kegiatan lain yang juga penting bagi mereka. Benyamin dkk. (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa benturan jadwal menjadi salah satu faktor teknis yang sering menyebabkan penurunan partisipasi peserta dalam program pembelajaran.

4) Minimnya Tenaga Pengajar Profesional

Jumlah tenaga pengajar profesional masih sangat terbatas. Sebagian besar instruktur berasal dari petugas internal atau relawan, dengan latar belakang pendidikan yang tidak selalu sesuai dengan materi yang diajarkan. Misalnya, pada program PKBM, keterbatasan guru bersertifikat berdampak pada kualitas proses pembelajaran formal yang diharapkan setara dengan sekolah umum.

Keterbatasan tenaga ahli ini memengaruhi dimensi program operation dan program terminal products, karena kompetensi pengajar berhubungan langsung dengan pencapaian hasil belajar peserta. Menurut Rahman (2022), keberadaan pengajar yang kompeten sangat menentukan keberhasilan pembinaan kepribadian, baik pada aspek kognitif maupun afektif peserta.

5) Keterbatasan Anggaran

Pendanaan program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati bersumber dari DIPA Lapas, bantuan mitra, dan donasi. Besarnya anggaran relatif kecil dibandingkan jumlah peserta dan kebutuhan fasilitas yang diperlukan. Keterbatasan anggaran ini memengaruhi intensitas kegiatan, ketersediaan sarana, dan kemampuan untuk mengundang tenaga pengajar profesional dari luar.

Pada dimensi program cost analysis, keterbatasan ini menunjukkan bahwa biaya yang dialokasikan belum sebanding dengan manfaat yang diharapkan. Provus (1969) menekankan bahwa analisis biaya-manfaat

harus mempertimbangkan kecukupan dana untuk mencapai standar yang telah ditetapkan dalam program design. Jika anggaran tidak mencukupi, maka akan sulit memenuhi kriteria keberhasilan yang direncanakan.

6) Dampak Kumulatif Kendala terhadap Kesenjangan Program

Kendala-kendala di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan memperbesar kesenjangan antara standar ideal dan pelaksanaan aktual. Ketiadaan SOP mengakibatkan pelaksanaan tidak seragam, sementara keterbatasan sarana dan prasarana memperlambat proses pembelajaran. Benturan jadwal mengurangi partisipasi peserta, yang kemudian diperparah oleh minimnya tenaga pengajar profesional sehingga kualitas pembelajaran tidak optimal. Semua ini diperkuat oleh keterbatasan anggaran yang menghambat upaya perbaikan.

Dalam kerangka Discrepancy Model, hambatan ini berdampak pada seluruh tahapan evaluasi: mulai dari program design (ketiadaan SOP), program operation (sarana dan tenaga

pengajar), program interim products (partisipasi dan motivasi), program terminal products (pencapaian hasil belajar), hingga program cost analysis (ketidakseimbangan antara biaya dan manfaat). Akibatnya, meskipun terdapat capaian positif seperti keberhasilan sebagian peserta PKBM memperoleh ijazah, tujuan pembinaan kepribadian secara keseluruhan belum tercapai optimal.

7) Implikasi Temuan terhadap Perbaikan Program

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi perbaikan program di masa mendatang. Pertama, diperlukan penyusunan SOP tertulis untuk setiap kegiatan pembinaan, sehingga pelaksanaan memiliki acuan baku yang jelas. Kedua, pengadaan fasilitas belajar khusus harus menjadi prioritas agar proses pembelajaran tidak terganggu oleh aktivitas lain. Ketiga, penjadwalan kegiatan perlu diintegrasikan dengan agenda lapas untuk menghindari benturan waktu. Keempat, rekrutmen atau pelatihan tenaga pengajar

profesional perlu ditingkatkan guna menjamin kualitas pembelajaran. Terakhir, penambahan anggaran perlu dipertimbangkan agar seluruh kebutuhan program dapat terpenuhi sesuai standar yang direncanakan.

Berdasarkan evaluasi Discrepancy Model, faktor-faktor kendala utama dalam program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati meliputi ketiadaan SOP tertulis, keterbatasan sarana prasarana, penjadwalan yang tumpang tindih, minimnya tenaga pengajar profesional, dan keterbatasan anggaran. Semua faktor ini bersumber dari kelemahan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, sehingga menimbulkan kesenjangan signifikan antara tujuan ideal program dengan hasil yang dicapai di lapangan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan menjadi 2 poin utama yaitu,

1. Evaluasi Program Pembinaan Kepribadian di Lapas Kelas IIB Tanjung Pati dengan menggunakan Discrepancy Model

menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan, seperti Pesantren, PKBM Paket A/B/C, Randai, dan PAUD, telah selaras dengan tujuan pemasyarakatan sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2022. Namun, seluruh dimensi evaluasi masih memperlihatkan kesenjangan antara kondisi ideal dan kondisi aktual. Pada tahap perancangan program, belum tersedia SOP tertulis sebagai acuan baku, sehingga pelaksanaan tidak seragam. Dalam pelaksanaan program, kegiatan memang didukung oleh petugas dan mitra, tetapi sarana prasarana masih terbatas, termasuk ruang belajar dan media pembelajaran yang kurang memadai. Produk sementara yang dihasilkan menunjukkan adanya peningkatan motivasi dan partisipasi peserta, meskipun tingkat kehadiran tidak konsisten karena jadwal kegiatan sering berbenturan dengan jam kunjungan atau agenda internal lainnya. Produk akhir yang dihasilkan mencakup keberhasilan sebagian peserta memperoleh ijazah setara SD, SMP, dan SMA serta peningkatan

pemahaman keagamaan, tetapi perubahan perilaku positif belum merata di semua peserta. Dari sisi pendanaan, anggaran yang bersumber dari DIPA, mitra, dan donasi belum proporsional dengan kebutuhan, sehingga membatasi intensitas dan kualitas kegiatan.

2. Sejumlah faktor menjadi kendala utama yang memengaruhi capaian program, yaitu ketiadaan SOP tertulis, keterbatasan sarana dan prasarana, jadwal kegiatan yang tumpang tindih, minimnya tenaga pengajar profesional, serta keterbatasan anggaran. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berdampak langsung terhadap kesenjangan pada seluruh dimensi Discrepancy Model, sehingga efektivitas program pembinaan kepribadian belum optimal dan memerlukan perbaikan pada aspek perencanaan, penyediaan fasilitas, penataan jadwal, peningkatan kualitas instruktur, serta penguatan dukungan anggaran.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diajukan

untuk mengatasi hambatan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan SOP Kegiatan yang Komprehensif dan Terstandar

Menyusun SOP tertulis mencakup tujuan, kurikulum, metode, evaluasi, dan pengawasan untuk menjaga konsistensi serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program pembinaan.

b. Melibatkan Tenaga Profesional dari Eksternal

Menggandeng lembaga pendidikan, seni, atau komunitas profesional guna menghadirkan instruktur kompeten sesuai bidang, meningkatkan kualitas materi dan proses pembelajaran.

c. Penjadwalan dan Pengelolaan Ruang Kegiatan yang Terintegrasi

Menyusun jadwal terkoordinasi antarprogram agar terhindar benturan waktu dan lokasi, memastikan penggunaan fasilitas sesuai prioritas dan kebutuhan pembinaan.

d. Penguatan Dukungan Anggaran Internal

Memperjuangkan anggaran proporsional untuk bahan ajar, honor profesional, pelatihan staf, serta perawatan fasilitas demi keberlanjutan program pembinaan kepribadian.

e. Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi Pasca-Program

Membangun sistem pemantauan mantan peserta melalui koordinasi lintas lembaga guna menilai efektivitas jangka panjang, mencegah residivisme, dan mendukung reintegrasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Benyamin, P. I., Salman, I., Pantan, F., Wiryohadi, W., & Mahendra, Y. (2021). Evaluasi Pembelajaran Daring Pendidikan Agama Kristen Di Masa Pandemi. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(1), 52.

Brahmatya, B., & Subroto, M. (2023). Peran Pembina Keamanan Terhadap Pembinaan Kemandirian. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains*, 12, 2023.

Hikmahanvazio, & Wibowo, P. (2022). Analisis Belum Terlaksana Program Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 660–669.

Provus, M. (1969). The Discrepancy Evaluation Model. Pittsburgh Public Schools.

Putra, A. (2020). Evaluasi Kelengkapan Peralatan Praktik Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK (Studi Kasus Di SMK Taruna Bangsa Bekasi). Universitas Negeri Jakarta.

Soge, M., & Sitorus, R. (2022). Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan, 2(2).

Suhariyanto, A., & Karyoto. (2024). Implementasi Pembinaan Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Jurnal Ilmu Hukum, 13(2).